

POLICYGRAPHY:
Kerangka Analisis Proses Kebijakan dari
Perspektif Non-Negara

Sukardi

Abstract:

What does policy-making look like if we look at it from society, particularly those who are forced to accept whatever the government had decided. This article attempts to over an analytical framework, by taking advantage of ethnographic works, the way social capitals being managed and utilized. These attempts are being enhanced through detail process of uncovering the public transcript and the hidden transcript shared and spread out within the community. The working together those processes help to understand how policy process works.

Kata-kata kunci: *Proses kebijakan; modal sosial; gerakan sosial*

***Policygraphy* Sebagai Kerangka Analisis**

Policygraphy adalah istilah yang penulis usulkan untuk menengarai corak kajian semacam yang disajikan dalam artikel ini. Sepanjang pengetahuan penulis, selama ini istilah ini belum pernah dipakai, karena pendekatan semacam yang dipakai dalam kajian memang juga pernah

Sukardi adalah staf pengajar pada Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur.

dilakukan. Usul penggunaan istilah ini sebenarnya dipicu oleh pengalaman penulis yang menggeluti suatu proses panjang dalam interpretasi sejumlah data mikro, semacam data etnografis, dari suatu penelitian lapangan. Sebagai suatu upaya untuk interpretasi, temuan dalam kajian ini tentu saja masih perlu diuji kebenarannya. Betapapun spekulatifnya, kajian ini bermaksud untuk melihat kebijakan publik sebagaimana adanya dari kacamata masyarakat bukan dari kacamata pejabat sebagaimana biasanya. Keberanian untuk mengusulkan istilah *policygraphy* ini bermula dari suatu kesimpulan antara, bahwa masyarakat pada dasarnya telah mempunyai sistem ekuilibrium sosial yang andal untuk menghasilkan kebijakan untuk mengatur tata nilai dan hidupnya sendiri. Ketika negara hadir dan mengklaim sebagai satu-satunya institusi yang berhak mengatur ketertiban masyarakat, maka lahirlah suatu kedigdayaan yang tidak absah. Berbagai penolakan menebar di mana-mana mulai dari yang radikal hingga yang akomodatif. Dalam tulisan ini, kebijakan publik dipahami dalam setting politis seperti itu. Perubahan kebijakan sangat erat kaitannya dengan delegitimasi kewenangan negara.

Sebagai suatu upaya untuk memahami detail proses kemasyarakatan yang berlangsung dalam kesehariannya, *policygraphy* mengamati proses kebijakan pada level aktor. Dalam istilah Snouijer (1997:14) studi ini menganut *actor oriented approach*. Populasi penelitian ini adalah komunitas petani di lima desa yaitu Simokerto, Telogogalih, Bumiasri, Kaprawiran dan Tirtorukun di kawasan Malang Selatan yang hingga kini terlibat konflik dengan PTPN XII. Sekitar 5000 rumah tangga petani terlibat dalam proses perebutan tanah dan pembabatan tanaman coklat. Dalam terminologi RK. Yin (1984:41-5) analisis yang dilakukan dalam kajian ini menganut strategi studi kasus berganda. Ada sejumlah kasus yang diamati secara beruntutan, yang masing-masing melibatkan satu isu besar. Jelasnya, *setting* empiris kajian ini adalah kasus konflik perebutan tanah antara petani melawan PTPN XII di Malang Selatan. Ini adalah salah satu, dari 26 kasus sengketa agraria besar yang ada di Jawa Timur.

Dalam menentukan responden penelitian di level desa dilakukan dengan proses sebagai berikut:

(a) Peneliti melakukan pelacakan singkat tentang aktor pelaku tertinggi

di tingkat komunitas. Proses ini terbantu oleh identifikasi nama-nama dari dokumen rahasia hasil interogasi yang dilakukan oleh Polres Kepanjen Malang.

- (b) Nama-nama tersebut kemudian direkonfirmasikan ke beberapa tokoh untuk mengetahui akurasi hasil interogasi
- (c) Peneliti menyeleksi beberapa nama petani di tiap desa yang masuk nominasi sesuai dengan informasi dari informan di tingkat lokal
- (d) Peneliti mengadakan wawancara bebas dan wawancara sambil lalu dengan beberapa orang tersebut.
- (e) Untuk merekonstruksi suasana sosial yang lebih akurat, peneliti melakukan wawancara dengan cara "membujuk" sejumlah pelaku berkumpul santai di tengah lokasi pembabatan. Untuk mengikat minat responden proses ini dilakukan dengan cara melakukan perekaman gambar "*shooting video*" yang kemudian hasilnya dibagikan kepada masyarakat sementara peneliti lebih banyak menggunakan data audio yang muncul dari proses tersebut.

Di samping itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa informan, aktor lain yang dinilai relevan untuk memperkuat bobot analisis penelitian di antaranya aktivis LBH Pos Malang, pengacara khusus pertanahan dari LBH Surabaya Pos Malang, LSM pendamping, Ketua dan Pengurus Forum Komunikasi Tani Malang Selatan (FORKOTMAS), Tentara Veteran, mantan Bupati Malang, mantan ketua Land Reform 1964-1970, Pengurus Paguyuban Petani Jawa Timur (PAPANJATI), para aktor intermediari antara lain para penghubung dengan militer, birokrasi, dan seringkali menjadi perantara berhubungan dengan jajaran militer, penasehat hukum Bupati Kabupaten Malang, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Malang.

Pencermatan proses kebijakan pada ranah interaksi antar aktor yang dilakukan dalam *policygraphy* sangat intens melibatkan proses pemaknaan. Dalam rangka itu, langkah vital dalam studi ini pemaknaan. Pemaknaan bagi komunitas petani merupakan proses interpretasi terhadap fakta dan fenomena yang ada di seputarnya. Apakah keberadaan perkebunan mempengaruhi keleluasaan atau penyusutan ruang pilihan untuk melakukan manuver mempertahankan subsistensinya? Apakah hadirnya perkebunan mencederai rentetan pergolakan relasi-relasi agraria yang berkembang di level komunitasnya? Beberapa pertanyaan ini sekedar contoh agenda kritis yang senantiasa

menjadi bahan perbincangan dari generasi ke generasi.

Interpretasi tentang makna kehadiran perkebunan di komunitas petani telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, secara sederhana dibedakan dalam tiga arus utama: fase pergolakan awal, fase represi kemudian fase penentangan dan pemberontakan. Fase pergolakan awal terjadi ketika petani dipaksa untuk melepaskan tanah-tanah yang telah dikuasainya. Fase represi ini merupakan hari-hari paling panjang, diawali sejak tampilnya Orde Baru hingga kejatuhannya. Fase ketiga adalah penentangan dan pemberontakan yang terjadi setelah Orba runtuh. Dari tiga kategori horison tersebut sebenarnya secara konsisten stamina petani tetap stabil dalam mewacanakan penentangan untuk mengembalikan tanah yang diambil oleh negara. Realitasnya derajat ekspresi penentangan petani saja yang berbeda dari beberapa kurun waktu tersebut.

Pada fase awal pergolakan penentangan diekspresikan dengan usaha-usaha untuk melobi dan menggugat ke beberapa institusi negara. Kendatipun upaya ini gagal, secara konsisten petani terus mengais aneka terobosan. Pada fase represi Orde Baru, usaha-usaha ini praktis berhenti, karena besarnya resiko yang akan ditanggung setiap kali mewacanakan penentangan. Kendatipun demikian di level kehidupan komunitas bentuk-bentuk penentangan tetap dilakukan dengan metoda-metoda yang lebih terselubung antara lain melalui perbincangan lisan dilengkapi dengan pencurian aneka tanaman perkebunan, sabotase kecil-kecilan dan ejekan-ejekan sarkastis kecil terhadap aktor-aktor perkebunan. Dalam terminologi James C. Scott (1990) fenomena penentangan yang disamarkan ini disebut sebagai 'transkrip tersembunyi' (*hidden transcript*). Perilaku petani untuk menentang dengan cara demikian adalah sebagai langkah cerdas untuk menopengi komunitasnya agar tidak disentuh resiko-resiko hukuman yang lebih besar sementara kegiatan penentangan dapat terus dilakukan.

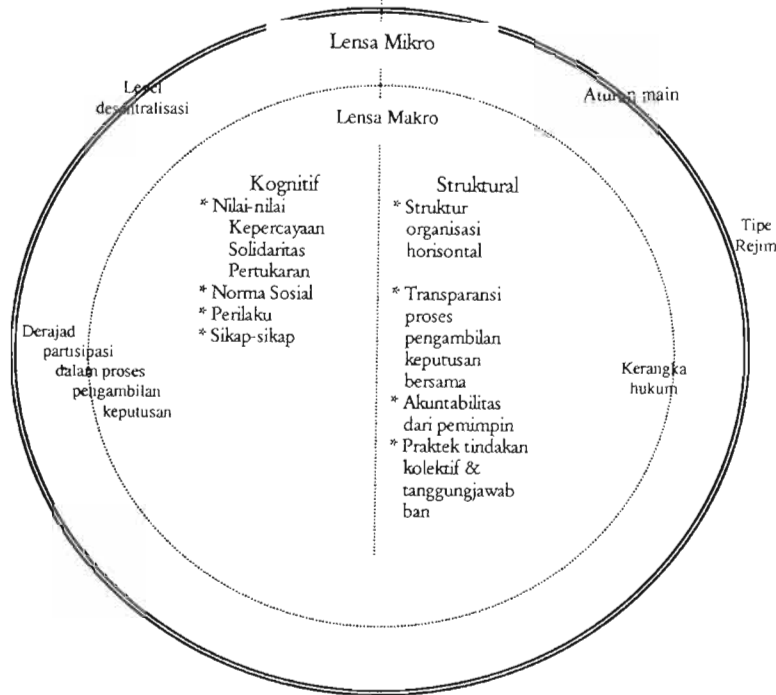
Pada fase menjelang kejatuhan Orde Baru wacana-wacana penentangan tersebut mulai menyembul lebih nyata. Reformasi menjadi atmosfer yang turut mendewasakan penentangan dari sekedar transkrip tersembunyi menjadi transkrip publik (*public transcripts*). Usaha-usaha untuk menempatkan posisi sejarah dan riwayat agraria lokal disosialisasikan lebih terbuka melalui medium yang lebih dapat

leluasa diakses publik. Idiom-idiom penentangan yang selama ini ditabiri topeng dalam transkrip tersembunyi secara perlahan diangkat dalam agenda transkrip publik sehingga dapat diketahui secara lebih luas. Proses perubahan model penentangan memang tidak berjalan selinier di atas; pemberontakan terbuka kecil-kecilan memang beberapa waktu diawali sebelum pemberontakan besar tahun 1998 tetapi nampaknya upaya-upaya itu di samping sebagai bentuk aksentuasi penentangan juga dapat diartikan sebagai eksperimen dari aktor-aktor sosial atas dasar keyakinan parokial. Namun demikian aneka pemberontakan kecil tersamar atau yang terbuka tersebut ingin menyatakan kuatnya stabilitas resistensi komunitas petani terhadap eksistensi perkebunan.

Bagaimana rakyat bisa mencapai sebuah suasana perubahan yang terkelola dengan sistematis dan tepat momentumnya? Inilah pertanyaan menjadi sentral kisaran argumentasi yang ingin dibangun dalam *policygraphy* ini. Dalam menganalisis perubahan kebijakan, penulis meminjam kerangka analisis yang belakangan ini semakin dikenal: modal sosial. Di balik dinamika masyarakat yang berlangsung, berjalan proses pendayagunaan (utilisasi) modal sosial. Peran modal sosial dalam suasana kedigdayaan negara dapat menjadi pilihan yang penting bagi masyarakat. Modal sosial yang dirawat dan dimuliakan dalam proses keseharian masyarakat dapat berubah menjadi kekuatan-kekuatan tandingan yang signifikan. *Policygraphy* diusulkan untuk mencermati proses kebijakan ini diperkaya dengan analisis tentang penangkalan, dan pendayagunaan modal sosial.

Konsepsi modal sosial menurut Fukuyama (1995, 1999) dan Putnam (1993) pada dasarnya adalah segala ihwal jaringan sosial yang mempunyai makna. Aspek-aspek jaringan sosial, norma sosial, pertukaran dan norma sosial yang mentautkan kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan bersama, masuk dalam kategori ini. Modal sosial dalam perbincangan ilmu-ilmu sosial menjadi pusat diskursus penting. Hal ini dapat disimak dari perjalanan terminologi ini hingga memasuki wacana akademis akhir abad ini.

Gambar 1
Peta Konsep Jenis dan Hirarki Modal Sosial



Sumber:

Diadaptasikan dari Anirudh Krishna dan Elizabeth Shrader, 1999 : 9

Sementara itu Krishna dan Uphoff (1999:50-2), dalam pemetaan pengukuran modal sosial, membagi dalam dua kategori besar: (a) modal sosial struktural yang di dalamnya terdiri dari peraturan (*rules*), peranan (*roles*), jaringan sosial (*social network*), prosedur; dan (b) modal sosial dimensi kognitif terdiri dari modal sosial yang berorientasi kepada orang lain antara lain: kepercayaan (*trust*), resiprositas (*reciprocity*), solidaritas (*solidarity*). Modal sosial kognitif yang berorientasi pada tindakan terdiri dari kerjasama, sifat kedermawanan atau sifat pemurah. Ahli lain Bullen dan Onyx (1998: 6-8) berdasar rangkaian penelitian di lima komunitas di New South Wales Australia, menyarankan delapan indikator modal sosial tanpa mengkategorisasikan pada hirarki kognitif

dan struktural. Kedelapan indikator tersebut adalah: (a) derajat partisipasi pada komunitas lokal; (b) proaktivitas dalam kegiatan sosial; (c) perasaan percaya dan aman; (d) tingkat koneksi atau hubungan ketetanggaan; (e) tingkat koneksi keluarga dan pertemanan; (f) derajat toleransi pada keragaman; (g) nilai-nilai pedoman hidup dan (h) jaringan kerja. (Lihat Gambar 1)

Berbeda dengan modal fisik, modal sosial bertransmisi dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan keagamaan, mekanisme kebudayaan, tradisi-tradisi sosial masyarakat atau kebiasaan masa silam (Fukuyama, 1995:26). Artikulasi secara teratur aspek-aspek kultural ini bahkan mampu berubah menjadi kekuatan politik yang signifikan. Studi Brenner tentang pemberontakan petani yang dikutip oleh Birmer dan Wittmer (2000:1) mengemukakan, modal sosial pada level komunal dalam pengelolaan sumber-sumber alam kolektif dapat berubah menjadi modal politik untuk menentang hegemoni negara dengan sukses. Karenanya, studi Considine (1994:254-5) mengemukakan, peran fenomena-fenomena kultural pembangun modal sosial dalam kebijakan muskil diremehkan

Perdebatan tersebut menjelaskan, modal sosial berperan besar dalam proses transformasi. Dalam konteks perubahan kebijakan publik, Deborah Stone (1997:220) sependapat peran modal sosial sebagai energi yang berbentuk ikatan dan norma resiprositas masyarakat menjadi penting. Dalam konteks komunitas dan kelembagaan menurut Serageldin dan Grootaer yang dikutip Bank Dunia (1998:6) modal sosial dapat dibedakan dalam dua dikotomi: orientasi hirarkinya dan orientasi lingkungannya. Dalam terminologi Putnam pembagian ini dilakukan dalam dua kategori, yaitu modal sosial tali pengikat (*bonding social capital*) yang diartikan sebagai jenis-jenis modal sosial yang fungsinya lebih eksklusif. Orientasi internalnya lebih kuat, solidaritas yang dibangun dengan modal sosial ini berimplikasi pada kohesi sosial dan soliditas mikro atau komunal. Sementara itu modal sosial tali penghubung (*bridging social capital*) berfungsi dalam aras yang lebih inklusif. Peran modal sosial tipe ini lebih banyak pada fungsi menjalin jaringan dengan potensi-potensi modal sosial eksternal.

Proses pembelajaran dan pendayagunaan modal sosial memiliki kontribusi dalam menggerakkan dinamika masyarakat. Dengan proses

ini, terjadilah suatu proses strategis dalam bentuk penggandaan kekuatan intelektual komunitas petani. Melalui pendayagunaan itu, berlangsung multiplikasi kekuatan intelektual tersebut yang pada gilirannya memasok intensitas penggunaan modal sosial lebih lanjut melalui beraneka insentif. Mereka, pada gilirannya mampu menciptakan derivat-derivat modal sosial selanjutnya untuk membimbing aneka modal sosial berkonversi menjadi kekuatan-kekuatan struktural dan instrumental. Proses ini yang sebetulnya dimaksud dengan kohesivitas internal komunitas (*bonding social capital*). Pada bagian akhir dibahas selintas sebuah proses aliansi dengan kekuatan-kekuatan eksternal komunitas, yang sebenarnya merupakan bentuk penangkaran modal sosial untuk mengawal hasil-hasil dari proses yang telah dilewati sebelumnya atau dikenal dengan penjalinan dengan modal sosial luar komunitas (*bridging social capital*).

Dalam studi ini, data yang diperoleh dianalisis berpedoman pada alur teoritik, melakukan interpretasi, mengontrol sensitivitas

Tabel 1
Penggunaan Transkrip dalam Proses Penangkaran Modal Sosial

	Modal Sosial Pengikat (<i>Bonding Social Capital</i>)	Modal Sosial Penghubung (<i>Bridging Social Capital</i>)
Transkrip Publik (<i>Public Transcripts</i>)	<i>Idiom, Sarkasme, Anonim</i> (I)	<i>Perangkap dan Sogok</i> (II)
Transkrip Tersembunyi (<i>Hidden Transcripts</i>)	<i>Agitasi Sugestif</i> (III)	<i>"Sowan" dan "Nyawis"</i> (IV)

subyektivitas melalui cek silang antar aktor. Kemudian disusun dalam kategorisasi-kategorisasi sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Salah satu kerangka kategorisasi yang dipakai adalah dengan mengkaitkan tipe transkrip publik dengan tipe modal sosial yang didayagunakan. Hal ini bisa dilihat dalam Tabel 1.

Identifikasi tipe modal sosial dan jenis transkrip publik yang ada di masyarakat membantu kita untuk memahami dinamika kebijakan.

Modal sosial pengikat bisa dilacak kehadirannya dalam transkrip publik dalam bentuk idiom, sarkasme dan anonimitas (tipe I). Pemakaian idiom, sarkasme dan anonimitas yang dikembangkan memiliki kaitan dengan proses dan dinamika yang digalang. Mobilisasi dukungan dan eksklusif fihak-fihak yang tidak disukai, dilakukan dengan pendayagunaan modal-modal sosial tersebut. Masyarakat, ketika berhadapan dengan situasi tertentu (misalnya berhadapan dengan aparat keamanan) mendayagunakan modal sosial yang punya kemampuan memerangkap. Mereka mengembangkan mekanisme sogok, yang ujung-ujungnya memperlemah kemampuan aparat untuk menindak masyarakat. Dari pelacakan transkrip publik maupun transkrip tersembunyi, peneliti bisa mengkaitkan proses perlawanan terhadap negara. Interpretasi data tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan penafsiran-penafsiran seraya mendeskripsikan hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Mengubah Kebijakan: Merebut Kembali Lahan

Kesepakatan untuk melakukan aksi perebutan kembali tanah-tanah yang diyakini sebagai milik leluhur masyarakat setempat memiliki akar panjang yang ingin dipaparkan di sini. Beredarnya wacana bahwa Perkebunan Kalibakar mengalami kemunduran dan tindakan-tindakan represi kepada penduduk lokal dalam rangka mengatasi kemunduran itu telah menjadi bibit bagi berkembangnya wacana perlawanan. Pengelolaan modal sosial yang berlangsung di sana menghasilkan aksi kolektif yang terpimpin dan terkoordinir secara rapi.

Kemunduran Perkebunan Kalibakar

Sejak awal kehadiran Perkebunan Kalibakar telah dipersepsi miring oleh sebagian besar penduduk. Apresiasi buruk ini utamanya bersumber dari proses pemerolehan tanah yang tidak *fair*. Di samping itu dari peta perkebunan yang tersebar di lima desa, struktur bidang tanahnya terfragmentasi dalam ceceran bidang-bidang kecil yang disebut dengan *verponding*. Di sebagian besar desa luasan total areal konsesi perkebunan mendominasi hampir 50% luasan tanah desa dengan kualifikasi geologis terbagus. Dari segi serapan tenaga kerja antara 1985 dan 2001 terlihat, perusahaan ini mengalami kontraksi yang sangat besar.

Jika pada tahun 1985 masih mampu menyerap tenaga sebesar 2293 pada tahun 1997 angka itu tinggal 818, nyaris tinggal sepertiganya, padahal ledakan angkatan kerja lokal bukan menyusut.

Beberapa *afdeling* di lima desa sebagian besar lahannya sudah *bongkor* dan ditumbuhi gulma liar, alang-alang dan bahkan ditelantarkan. Beberapa upaya memperlambat proses ini sebenarnya dilakukan oleh Administratur dengan menyakapkan beberapa areal yang *bongkor* kepada para petani di tiap desa. Di Desa Kepatihan misalnya, sejak tahun 1993-an setidaknya telah ada lahan nyaris separo areal konsesi perkebunan yang disakapkan kepada petani dengan mekanisme 'lanyahan'. Setidaknya ada 400 rumah tangga petani yang terlibat dalam hubungan penyakapan dengan perkebunan Kalibakar. Pada saat perjanjian 'lanyahan' tahun 1997 setidaknya 7,75 ha areal baru di Kepatihan disakapkan kepada 11 orang petani di Kepatihan. Sejak sistem 'lanyahan' dipraktekkan di beberapa tempat muncul anggapan di kalangan petani bahwa PTPN Kalibakar nampaknya tak lagi mampu mengelola kebun secara baik. Hal ini juga ditunjang oleh kesaksian petani yang melihat beberapa areal HGU yang semestinya menurut ketentuan ijin hanya boleh ditanami coklat dan cengkeh ternyata justru ditanami aneka tanaman tahunan: pete, mahoni, bendo, pisang, kelapa itupun dengan kondisi tak terawat. Di samping itu, beberapa pekerja menuturkan setiap ada inspeksi dari kantor Direksi Surabaya, para buruh yang sedang bekerja diperintahkan bersembunyi ke tengah kebun sehingga sulit dijangkau oleh pejabat yang kontrol. Menurut dugaan beberapa petani ini semakin memperteguh anggapan bahwa ada yang tidak betul dalam manajemen PTPN misalnya dalam hal penentuan upah.

Wacana Penentangan

Perkembangan wacana memiliki kaitan dengan proses pembentukan pengetahuan kolektif komunitas petani. Di tingkat lokal proses ini sebenarnya mempunyai empat pilar momentum. Keempatnya akan diuraikan secara singkat berikut ini.

Pemahaman dan interpretasi sejarah lokal. Pada periode awal 40-an rakyat mengokupasi tanah bekas perkebunan Belanda, kemudian tanah garapan rakyat diokupasi oleh negara. Pemaknaan ulang sejarah lokal diangkat sebagai tema penting setelah menelaah keterkaitan berbagai

rangkaian peristiwa yang mendahului proses pergolakan petani di lima desa amatan. Pemaknaan ulang sejarah yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah sebuah usaha dari sekelompok aktor untuk menemukan bukti-bukti alternatif, dan testimoni dari sumber-sumber yang representatif untuk dijadikan rujukan memperbaiki atau bahkan merombak pemaknaan sejarah lokal. Hampir tiap desa, para petani yang akan dihimpun dalam sebuah kelompok pembabat atau bahkan panitia selalu mendahuluinya dengan melakukan proses rekonfirmasi kepada sumber-sumber lokal otentik dengan seksama. Mereka sangat beruntung, sebab sumber-sumber yang diperlukan tersebut hingga kini masih tersedia antara lain: para veteran yang pernah disantuni tahun 1945-1949, para petani yang pernah domisili di tengah areal perkebunan, kuburan-kuburan dan sisa-sisa peradaban komunal yang masih terjaga: sumur, punden, tanaman tahunan yang dibiarkan tumbuh dengan diameter pohon nyaris 2 meter.

Kemunduran kinerja dan manajemen PTPN. Kemunduran ini menjadikan PTPN tidak dapat mengadopsi dinamika dan struktur kependudukan lokal. Meluasnya lahan *bongkor* di berbagai areal perkebunan dan kemudian dibagihasilkan dengan penduduk dengan sistem "lanyahan". Di desa Bumirejo penduduk yang menjalin hubungan bagi hasil mencapai 60 orang, Kepatihan mencapai 400 orang dengan bagi hasil 60% petani dan 40 % PTPN. Fakta ini diinterpretasikan oleh penduduk sebagai bukti PTPN tidak lagi kuasa dan memadai mengelola tanah yang begitu luas.

Luka dan memori kolektif. Imam Suja'i mengatakan secara sarkastis, para buruh PTPN itu telah berubah dari manusia menjadi "anak-e kloneng" (begitu terdengar bunyi neng-neng-neng dipagi buta mereka bergegas dan berlomba untuk mendatangi kantor perusahaan untuk dapat direkrut sebagai buruh hari itu, keadaan ini berlangsung hingga pertengahan 1998). Pengalaman-pengalaman buruk berinteraksi dengan pihak perkebunan membekaskan luka dan memori kolektif yang tidak mudah dihilangkan. Seringkali para pekerja menerima umpatan sangat kasar dan menyakitkan untuk ukuran lokal dari para mandor tentang perilaku bekerjanya yang sering mencuri dan tidak mengindahkan tanaman perkebunan. Dalam wawancara tanggal 21 Juni 2002 misalnya Imam Suja'i menirukan ucapan kasar para mandor yang sering diadukan oleh para buruh dari kalangan kerabatnya "...matamu, ngerahi ramban

no kono ki opo tandurane mbahmu ? ..." begitu sapaan seorang mandor ketika menghardik seorang buruh atau petani yang sedang menebang beberapa ranting dedaunan untuk pakan kambing.

Setiap ada patroli dan kontrol dari kantor PTPN Surabaya, para buruh diminta untuk bekerja jauh ke kawasan dalam kebun sehingga tidak bisa dijangkau oleh inspeksi dan tidak ditanyai tentang upahnya. Ini juga yang menimbulkan persepsi bahwa penindasan upah tengah dilangsungkan oleh PTPN kepada para penduduk atau para buruh yang bekerja di situ. Upah yang rendah, serapan tenaga kerja yang buruk, dan perlakuan yang tidak manusiawi kepada kriminal-kriminal kecil di tiap desa telah memperkuat sebuah anggapan bahwa perkebunan yang hadir dalam suasana kemerdekaan dan kebebasan bangsa inipun masih juga belum berubah, masih "kelondo-londoan" (Wawancara Imam Suja'i, Bawon dan Yasin 26 Juni 2001). Pencuri dedaunan untuk pakan ternak tatkala ketangkap harus dihajar oleh seorang anggota Koramil di tengah kebun itu juga. Kemudian setelah itu dibawa ke kantor POLSEK Tirtoyudo dan harus ditebus dengan uang Rp. 400.000, yang diperolehnya dengan menjual dua ekor kambing yang dihidupi dengan pakan curian itu. Sistem rekrutmen bekerja terhadap angkatan kerja lokal tak lebih dari 3%, itupun hanya dipekerjakan paroh bulan juga memperlihatkan betapa manajemen perkebunan tidak lagi mampu menjadi naungan yang memadai terhadap ledakan angkatan kerja yang berubah lebih pesat.

Munculnya pemicu. Pada tahun 1994 secara sepihak PERHUTANI akan melakukan pengukuran dengan menyerobot tanah-tanah rakyat. Pada periode-periode tahun 70-an ekspansi areal perkebunan dilakukan dengan cara mengosongkan pemukiman di tengah-tengah desa-desa kawasan Malang Selatan. Usaha ini dijalankan dengan sokongan kekuatan militer lokal besar. Di beberapa tempat antara lain Desa Kepatihan, Desa Bumirejo banyak orang yang akhirnya gantung diri di dalam rumahnya karena tidak ingin dipindahkan. Sampai akhirnya antara tahun 1969-1974 muncul sebuah opini yang ditakuti masyarakat. Opini tersebut antara lain mengisyaratkan bahwa desa-desa yang berbatasan di empat afdeling yaitu: Kalibakar, Petungombo, Sumbergesing dan Lebakharjo segera akan dipindahkan ke desa lain. Kebun-kebun yang rusak akan direnovasi, dan rakyat yang telah mendiami kawasan tersebut diharuskan pindah.

Serentak kasak-kusuk ini ditanggapi masyarakat dengan gerakan menanam pohon puring di setiap pojok dan pembatas antar persil garapan tanah. Puring itu berdaun warna merah hati dan lazimnya hanya ditanam di kawasan pekuburan rakyat. Beberapa rakyat menuturkan tentang makna gerakan menanam puring saat itu :*"...yen sampek rakyat dikongkon pindah kabeh jelas bakal banjir getih deso Kalibakar ki... tetep ora gelem kon pindah...."* (Wawancara dengan Matsholeh, Tirtoyudo 3 Juni 2000 dan Imam Suja'i, Simojayan 26 Juni 2001)

Usaha-usaha rakyat untuk mengembalikan tanah tersebut tak pernah surut, tahun 1970 Bunasar seorang lurah dari Simojayan harus mendekam 13 hari di penjara karena ngotot akan mengurus tanah-tanah eks perkebunan Belanda di desa Simojayan. Imam Suja'i yang kini mewarisi kedudukan kakeknya tersebut iba melihat kakeknya yang dianiaya oleh beberapa polisi dan ditelanjangi, sholat pun harus dilakukan dengan sembunyi. Wasiat terakhir yang hingga kini masih dipegang teguh oleh Imam Suja'i adalah ketika menjelang ajalnya. Bunasar secara khusus memanggilnya sembari diberi tujuh buah keris yang hingga kini dirawatnya setiap bulan Muharram, dan setiap malam Jum'at diberi beberapa "sandingan" bunga, rokok, minyak wangi. Lebih lanjut Imam Suja'i menuturkan kembali wasiat kakeknya tersebut

"...Ngene yo le... cathetono barange uwong-uwong sing wis kanggo berjuang ngrebut tanah iki. Tanah ki sak jane biyen dudu duwek e sopo-sopo tapi olehe berjuang nglawan londo...masiyo aku engko ora iso nerusno perjuangan iki, ganti terusno masiho rogoku ora ono insya Allah rohku arep nyawiji karo kowe..." (Wawancara Imam Suja'i, Simojayan 2 Mei 2002).

Ketika Imam dimohon komentarnya hubungan antara wasiat tersebut dengan kegigihan tekadnya mengembalikan tanah ia menandaskan :

"...makane kulo niki cincing-cincing duwur berjuang niki nggih kranten wasiat niku, kanggene kulo lek berjuang niki mboten ngantos kasil niki isin saestu, timbangane mundur luwih becik mati kulo, lha engke lek sampek mundur koyo nopo rai kulo niki, lek kulo gadah anak wedok mboten kiro

ajeng dilamar uwong soale bapak-e nglewes...kae lho anak e Imam ra payu, lha piye le arep payu wong bapak e nglewes ngono ...". Wawancara Imam Suja'i, Simojayan 2 Mei 2002).

Dari Transkrip Tersembunyi menjadi Aksi

Keyakinan petani bahwa mereka adalah korban konspirasi dari sebuah kekuatan besar telah menancap di hati sebagian besar penduduk. Sekalipun tanah-tanah yang dikuasai PTPN telah dipayungi oleh dokumen hukum yang syah, substansinya adalah tidak benar. Ketika tanda-tanda kemunduran mulai merayap dan ini berarti awal eksistensi perkebunan tak lagi mampu menyediakan sedikit naungan sosial penentangan sebagian besar petani tidak dilakukan secara terbuka. Apalagi dalam kurun waktu tersebut represi negara menjadi ancaman nyata siapapun yang mencoba mengekspresikan perlawanan terhadap eksistensi perkebunan. Satu-satunya perlawanan yang gagal dikontrol oleh kekuatan represif adalah melalui ejekan, anekdot, sarkasme, cibiran yang dikembangkan dalam sebuah interaksi dan penuturan petani sehari-hari. Sementara itu model perlawanan ini juga dilengkapi dengan pencurian buah coklat, menebang tanaman penaung, melakukan kerusakan-kerusakan kecil sekenanya di areal perkebunan, mengadakan sabotase kecil selama menjadi buruh di perkebunan misalnya menaburkan pupuk di tempat yang salah, membuang pupuk, membuang pestisida di tengah kebun, membiarkan aneka hama dan pengganggu bersembunyi di tempat yang telah diketahui.

Beberapa modal perlawanan tersembunyi petani ini bukan hanya dilakukan oleh para petani yang secara terbuka menentang eksistensi perkebunan, tetapi juga dilakukan oleh para buruh perkebunan yang leluasa dapat mengakses beberapa jenis pekerjaan di tempat ini. Beberapa mantan buruh juga menjelaskan, aneka perlawanan terselubung ini jika sampai diketahui mandor atau sinder kebun juga memperoleh sangsi untuk tidak lagi dipekerjakan. Akan tetapi bagi mereka itu soal sangat sederhana, sangsi tersebut beberapa kali dapat ditebus dengan cara memberikan semacam 'uang rokok' dan bingkisan natura kepada sang mandor atau sinder kebun. Berikut ini diidentifikasi beberapa jenis perlawanan tersembunyi yang terekam.

Tabel 2
Transkrip Tersembunyi Perlawanan Buruh Perkebunan

Momentum Jenis Pekerjaan Buruh	Jenis Sabotase dan Perlawanan yang Disamarkan
Pembuatan Lobang Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Kedalaman dikurangi • Pemilihan lokasi tak sesuai kriteria • Mencari cara lokasi tanah-tanah yang gembur
Penutupan Lobang Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Ditimbun dengan dedaunan baru kemudian ditimbun dengan tanah • Tidak diinjak-injak dengan padat, sesuai dengan petunjuk
Penanaman	<ul style="list-style-type: none"> • Bibit coklat ditanam dengan agak dibenamkan sehingga akar tunjangnya dalam posisi tertekan • Penanaman dilakukan dengan sekenanya, tanpa peduli naungan yang ada di atasnya
Jombret	<ul style="list-style-type: none"> • Memangkas daun-daun coklat yang masih muda • Memangkas dengan menggunakan 'tarikan tangan' bukan sabit atau pisau
Berantas hama	<ul style="list-style-type: none"> • Penuangan menu pestisida sekenanya • Penyemprotan hanya dengan mengirit air agar dapat diperoleh lahan sebanyak mungkin • Tidak menyemprot di bagian mukim hama, tapi dedaunan yang terjangkau penglihatan saja
Wiwil	<ul style="list-style-type: none"> • Memetik dedaunan dan calon buah coklat tidak dengan teliti
Pengaturan Naungan	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya menebang dedaunan naungan yang dapat dipergunakan untuk pakan ternak • Menebang penaung di dekat akses jalan
Pemupukan	<ul style="list-style-type: none"> • Menabur pupuk tidak tepat mendekati pangkal pohon coklat • Menaburkan pupuk tidak sesuai dengan takaran semestinya *)
Pembuatan teras	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan gundukan tanah sekenanya, mengambil tanah urugan dari tempat-tempat yang dilarang (dekat pohon coklat)
Lanyahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencuri tanaman menjelang dibeli oleh para pengijon • Mengurangi takaran bagian untuk pihak perkebunan

*) fenomena ini juga dilakukan bukan saja oleh petani tetapi juga oleh mandor karena tarjet pupuk telah dicuri dalam proses pengangkutan ketika menuju lokasi perkebunan.

Tabel 3
Alternatif Transkrip Tersembunyi Perlawanan Petani

Momentum Jenis Perlawanan	Jenis Sabotase dan Perlawanan yang Disamarkan
Mencari pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> Menebang daun tanaman penaung Memangkas beberapa helai daun coklat
Mencari sayur daun pakis	<ul style="list-style-type: none"> Mencuri buah coklat muda dibawa pulang Memakan buah coklat muda di tempat
Mencari kayu bakar	<ul style="list-style-type: none"> Menebang ranting tanaman penaung
Mobilisasi kerja komunal	<ul style="list-style-type: none"> Memetik coklat muda dan dimakan ditempat Memangkas aneka tanaman penaung Memangkas ranting dan dahan pohon coklat
Menjadi buruh di petani	<ul style="list-style-type: none"> Memetik buah pisang Memetik buah kelapa
Memberikan Sebutan ('Julukan')	<ul style="list-style-type: none"> Stigma anak 'kelondo-londoan' kepada pegawai perkebunan Tidak memperlihatkan respek yang sejati kepada kalangan pegawai perkebunan : tidak mendatangi undangan selamatan, hajatan.
Jelang saat peringatan 17 Agustus	<ul style="list-style-type: none"> Memeras administratur dengan aneka sumbangan kegiatan
Saat musim penghujan tiba	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa dukuh di kawasan kantor perkebunan mengajukan proposal untuk pemasangan gorong-gorong air, perbaikan jalan

Tabel 4
Beberapa Idiom dan Transkrip Tersembunyi untuk Melawan dan Mengendalikan Penentang Perebutan Tanah

Idiom Lokal	Makna Penjelas	Arah Lawan
Fulus	Siapa memberi uang kepada para pejabat dan tentara pasti lulus untuk meminta sesuatu	Tentara, pejabat
Gerilya	Membabat dengan cara menipu tentara. Memabokkan tentara dengan aneka minuman keras, memanjakan tentara dengan hidangan semewah mungkin sementara gerak pembabatan diorganisir rapi	Tentara
Setruman	Menyebarkan informasi khusus secara tersembunyi kepada beberapa orang yang sangat dipercaya	Agen-agen rahasia dan preman perkebunan di desa, tentara

Idiom Lokal	Makna Penjelas	Arah Lawan
Getok tular	Menyebarkan informasi yang kurang rahasia kepada semua orang yang dipandang relevan	Agen-agen rahasia dan preman perkebunan
Haram	Ha...ha...erak e eram, (haa erak sekali) sebutan sarkasme untuk kata 'haram', yang diterakan kepada tanah-tanah yang direbut petani	Petani-petani yang tidak loyal kepada kelompok pembabat
Kaku kudu kenek gae tali, lemes kudu kenek gae pikulan	Untuk menakut-nakuti tentara agar tidak kasar kepada rakyat, bersifat luwes saja	Tentara komando, operator di lapangan
Manungso niku sik apik luwak, lek ketok gedang sak curung sing mateng situk dipangan, lek menungso sak wite dipikul	Untuk mengendalikan ulah para elit panitia agar tidak serakah dalam membagi tanah hasil perebutan, dan selalu ingat bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya bisa hilang bila dikhianati	Panitia pembagian tanah yang nakal
Ngentup	Sebutan untuk memberikan stigma kepada para agen intermediari yang selalu membuat susah penduduk dan panitia	Aktor intermediari
Lek dadi uwong ojo sampek gak diundang kajatan	Ancaman pengucilan kepada siapapun petani yang tidak mendukung upaya perebutan tanah	Petani penentang perebutan tanah
Jula-juli	Kesanggupan panitia pembabatan untuk meladeni aneka permintaan tentara asalkan tidak menembak penduduk	Tentara
Sak ganas-ganase lele matil tapi lek diumpani cacing gedi wis gak kiro iso matil, paling angob	Temperamen pejabat dan tentara yang tidak lagi bisa menolak permintaan masyarakat asalkan sudah diberi uang sogok dan dipenuhi permintaannya	Tentara, pejabat
Tikus luwe lungguh pari	Betapa bodohnya, ada tanah rakyat yang diserobot negara mengapa membiarkan diri kelaparan	Petani yang penakut
Musuh siji kabotan, bolo sewu kurang	Musuh seorang sudah terlalu banyak, kawan seribu masih kurang. Untuk mengingatkan petani betapa pentingnya kerukunan	Petani yang suka temperamental dan berkonflik sesama
Yaholo	Ungkapan untuk menyerang para panitia perebutan agar jangan terlampau berlebihan menentang kepala desa	Panitia mantan narapidana

Idiom Lokal	Makna Penjelas	Arah Lawan
Ngempit tanah	Ungkapan untuk melukiskan betapa jahatnya panitia pembagian tanah yang leluasa dapat melakukan pengukuran tanah kemudian menjualnya kepada para petani	Panitia pembagian tanah
Barang tetanus	Cara terbaik untuk memberikan uang sogok adalah dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh rakyat, sehingga sewaktu-waktu rakyat dituntut hukum dapat dengan mudah menyeret yang ikut menikmati	Tentara, pejabat

Kegelisahan demi kegelisahan di beberapa kantong perkebunan akhirnya juga tak dapat disembunyikan. Ada kesadaran luas bahwa penentangan terhadap eksistensi perkebunan dapat diibaratkan "*timun mungsu durian*" (buah mentimun melawan durian), artinya berhadapan dengan sebuah kekuatan perkasa. PTPN ditopang oleh negara, mempunyai uang, mampu mengerahkan tentara dan bisa jadi didukung birokrasi

Pada tahun 1996, Imam Suja'i, Simojayan menjadi kepala desa pertama yang secara tersamar merancang sebuah penentangan dalam sebuah pentas teatral wayang kulit di forum publik. Langkah ini adalah sebuah awal sosialisasi brosur sebagaimana diyakini banyak orang. Lakon wayang yang dipentaskan dalam acara tersebut adalah "*Gatot Kaca Nagih Janji*" seraya mendatangkan dalang dari Puger, Jember. Sinopsis inti dari cerita ini adalah ketokohan seorang pemuda pelopor untuk menagih janji kepada sebuah kerajaan karena pernah meminjam tanah dari kakek pemuda tersebut. Ketika itu terjadi dialog dalam pemilihan lakon antara Imam yang waktu itu masih sekretaris desa dengan Jair sebagai kepala desa. Sinopsis lakon ini menurut Imam adalah identik dengan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi penduduk Simojayan :

"...khan tanah Pendowo dikuwasai Kurowo, dadi Pendowo ra iso nagih, putune Pendowo Gatutkoco sing kongkon nagih niku, wah rame terus perang muwon.....Iha sak jane ngoten

sing dadi Gatutkaca niku kulo !!!, mantun ngoten 3 wulan sakrampungge tanggapan wayang bersih desa niku kebun PTP teng ngriki buyar...". (Wawancara Imam Suja'i, Simojayan 2 Mei 2002).

Sejak saat itu Imam yang waktu itu masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Simojayan dianggap sebagai tokoh yang sangat berbahaya dan mengancam eksistensi *afdeling* Petungombo. Beberapa kali didatangi oleh pejabat PTPN dan diminta untuk mundur dari aktivitasnya sebagai pembangun opini dengan imbalan gaji 5.000.000 sebulan ditambah dengan berbagai fasilitas mobil Taft. Imam memperoleh simpati besar dari para pejabat PTPN ketika akan menjemput dalang ke Puger juga dipinjam mobil Taft PTPN, demikian pula mobil butut yang sudah tua dan sering ngadat dibelikan ban oleh PTPN. Seraya tetap menjaga hubungan baik dan tidak pernah menolak berbagai pemberian yang wajar, Imam tak menyurutkan aktivitasnya setelah sukses mengambil alih tanah Titisoro 1992, gelombang kedua pembabatan tanah terulang kembali tahun 1997. Pada tanggal 23 Desember 1997 areal tanaman coklat dan tanaman penaung di perkebunan seluas 240 ha di Simojayan dibabat rakyat dan seluruh tanaman di atasnya rata dengan tanah. Peristiwa ini menjadi bahan perdebatan sengit di berbagai koran lokal. Di samping itu, gelombang pembabatan hutan Titisoro kemudian diteruskan ke areal tanaman coklat PTPN ini telah menorehkan sebuah eksperimen sosial paling penting di kalangan komunitas petani yang berlarut-larut terlibat konflik tertutup dengan perkebunan. Peristiwa Simojayan mengirimkan pesan kepada seluruh rakyat yang ada di kawasan PTPN XII untuk mencermati, bahwa segalanya serba mungkin kalau rakyat bersatu dan berani memulai sesuatu. Sejak saat itu beberapa penduduk di enam desa lainnya terus membicarakan dan mengintip bagaimana seorang Imam Suja'i yang berkedudukan sebagai sekretaris desa dapat mengorganisir penumbangan ratusan ribu pohon coklat. Mat Sholeh yang kemudian duduk sebagai koordinator pembabatan tanaman coklat dari Tirtoyudo dan Giman koordinator dari Kepatihan ketika bertandang ke rumah Imam Suja'i diledek demikian "*...wis lek kon gak wani ndang mbabat mbok sayak an...engko tak kado kathok yo ..."* Kata-kata ini betul-betul melecut dua orang keturunan Madura yang terkenal bertemparamen keras itu. Sejak itu informasi terus menebar, tentang bagaimana cara-cara Imam Suja'i mengorganisir rakyat, dan bergerilya menghadapi

tentara yang bersenjata lengkap.

Kabar bahwa Simojayan sukses menebang pohon coklat di areal HGU PTPN XII mewarnai berita lokal, publikasi koran, radio terus menyiarkan perkembangan hari demi hari gerakan rakyat di desa tersebut. Sementara itu proses sosialisasi di lima desa lainnya terus dilangsungkan oleh beberapa pemuka desa. Di tengah suasana gejolak politik nasional, Desa Tirtoyudo dan Kepatihan juga tengah mempersiapkan pergantian kepala desa. Isu pengembalian tanah-tanah yang dipinjam PTPN langsung dijadikan komoditas kampanye yang diperankan oleh para kader masing-masing kandidat kepala desa di dua desa tersebut. Bersamaan dengan itu, di Desa Bumirejo, proses sosialisasi tentang kedudukan sejarah tanah di desa-desa tersebut terus disebarluaskan dalam pembicaraan-pembicaraan informal di antara rakyat sendiri. Pertemuan tahlil, yasinan di masjid atau di rumah-rumah terus dilakukan disertai dengan perbincangan sejarah tanah yang sebenarnya itu bagaimana.

Sementara di Desa Bumirejo berlangsung kegiatan untuk menghimpun kesaksian ini, juga telah diawali oleh Bawon dan Sutrisno dengan mendatangi beberapa orang tua yang masih hidup di desanya untuk mendapatkan konfirmasi tentang status pemilikan tanah. Setidaknya 19 orang berusia lanjut telah didatangi Bawon dan kawan-kawannya untuk dimohon bercerita tentang riwayat tanah di desanya. Besarnya tekad Bawon untuk terlibat dalam berbagai proses gagasan pengambilalihan tanah sebenarnya dilandasi oleh sebuah pengalaman pribadi sangat mendalam. Ketika usianya masih SMP Bawon kecil sering diajak ke rumah adik kakeknya yang bernama Dulkosen. Beberapa kali pertemuan itu ia dan Dulkosen terlibat dialog tentang tanah eks perkebunan Belanda yang kemudian diserobot PTPN. Dialog terjadi antar cucu kecil yang masih duduk di SMP dengan sang kakek :

"...kon terusno sekolah sampek duwur le... engko lek wis sekolah duwur tanah kuwi jupuk en, tanah iku podo karo tanah ndik kitren omah iki le...wek e bapak mu, mbah mu kabeh ono tengah kono, sakik karo pak Akup (Kades) biyen di kek no londo..." (Wawancara Bawon Basuki, Bumirejo tanggal 14 Mei 2002).

Penutup

Bagaimana masyarakat "mengelola" perubahan dalam setting yang sulit yang dikomunikasikan sebagai situasi "timun mungsuh duren" ini? *Pertama*, di dalam masyarakat terjalin suatu sinergi antara proses advokasi yang digalang oleh tokoh-tokoh kunci yang dibarengi dengan suatu proses pembelajaran melalui medium yang mereka kuasai. Hal ini terlihat dalam rekrutmen aktivis, penciptaan modal sosial perangkap dalam rangka meminimalisir potensi pembalasan dari aparat negara, penentuan strategi pembabatan dan sebagainya. *Kedua*, melalui institusi sosial yang ada berlangsunglah suatu proses, yang penulis sebut penyelarasan dan konversi modal sosial menjadi modal perubahan. *Ketiga*, dalam rangka mengerahkan energi masyarakat, berlangsung perombakan wacana, dari corak lama yang meneguhkan pelapisan sosial ke corak baru yang memetakan polarisasi sosial. Solidaritas yang tadinya dikelola atas dasar kesamaan status dikonversi ke dalam solidaritas atas dasar kesamaan sikap. Terjadi redefinisi kategorisasi siapa kawan dan siapa lawan. *Keempat*, di masing-masing desa berlangsung suatu kompetisi sengit menyeret pemerintahan desa masuk dalam kubu gerakan masyarakat. Dengan menyeret pemerintah masuk ke dalam peta konflik, maka kapasitas kelembagaan desa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Butir-butir temuan tersebut di atas disarikan dari suatu proses detail dan berliku dalam upaya memaknai apa yang dilakukan masyarakat, dengan mengacu pada keseharian mereka. Karena keterbatasan halaman, detail paparan *policygraphy* tentang hal itu tidak bisa disajikan di sini. Penulis hanya berharap, peragaan *policygraphy* yang telah dicontohkan di atas mengilhami komunitas pengkaji kebijakan publik tentang alternatif cara memahami dan menganalisis proses kebijakan.

Dalam kasus yang dikaji ini, perjuangan petani ternyata membuahkan hasil yang menggembirakan mereka. Mereka berhasil memperoleh kembali tanah-tanah yang pernah diokupasi oleh rejim kapitalisme pemerintah kolonial, kemudian diteruskan oleh pemerintahan republik Indonesia. Sejak tahun 1999 penguasa tanah tersebut menemukan titik balik yang signifikan. Dari 2050 ha tanah subur yang semula dikuasai oleh negara melalui PTPN XII dan dilebati tanaman coklat, kini tanah seluas itu *direclaiming* oleh rakyat dan disulap menjadi hamparan tanaman pangan ketela dan jagung. Dalam seketika

tanah seluas itu kini dapat menyulap berbagai bentang fakta sosial lima desa di wilayah tiga kecamatan lereng Gunung Semeru yaitu desa: Simokerto, Telogogalih, Bumiasri, Kaprawiran dan Tirtorukun. Setidaknya 5000 rumah tangga petani di lima desa tersebut kini merasa telah menjadi manusia yang sebenarnya, setelah puluhan tahun menjadi pengunjung dan penonton di atas tanah leluhurnya. Paceklik pangan yang biasanya akrab menghampiri rumah tangga petani menjelang musim penghujan tiba, kini dapat dihalau kehadirannya. Simbol benda mewah mulai dari elektronika hingga mainan anak yang biasanya hanya dapat mereka angankan, kini benar-benar telah hadir di keseharian rumah tangga petani yang telah begitu akrab dengan kemiskinan. ***

Daftar Pustaka

- Birner, Regina dan Heidi Wittmer, (2000). 'Converting Social Capital into Political Capital, : How do local communities gain political influence ? A theoretical approach and empirical evidence from Thailand and Columbia.' Paper submitted to the 8th Biennial Conference of the International Association for the Study of Common Property (IASCP), available at <http://www.indiana.edu/~iascp/iascp2000.htm>
- Considine, Mark (1996). *Public Policy: A Critical Approach*. Sydney: Macmillan Education Australia.
- Fukuyama, Francis (1995). *Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Fukuyama, Francis (1999). 'Social Capital and Civil Society.' Paper for delivery at IMF Conference on Second Generation Reforms, George Mason University.
- Krishna, Anirudh dan Elizabeth Shrader. (1999). 'Social Capital Assessment Tool.' Paper prepared for the Conference on Social Capital and Poverty Reduction, June 22-24, The World Bank, Washington D.C.

- Krishna, Anirudh dan Norman Uphoff. (1999). 'Mapping and Measuring Social Capital : A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conerving and Developing Watersheds in Rajasthan, India.' Social Capital Initiative Working Paper No. 13, The World Bank, Washington.
- Onyx, Jenny dan Paul Bullen. (2000). 'Measuring Social Capital in Five Communities.' *The Journal of Applied Behavioral Science*, Vol. 36, No. 01. p. 23-42
- Putnam, Robert D. (1993). 'The Prosperous Community : Social Capital and Public Life.' *The American Prospect*. Vol. 4, Issue 13, March 21.
- Scott, James (1990). *Perlawanan Kaum Petani*. Jakarta: LP3ES
- Snoijen, Josette (1997). 'Strategies in Sand : An actor-oriented evaluation of a Participatory Rural Appraisal process I Etsha Bostwana.' Occasional paper No. 72, Third World Centre, Development Studies Catholic Universty of Nijmegen.
- Stone, Deborah (1997). *Policy Paradox : The Art of Political Decision Making*. New York: W.W. Norton & Company Inc.
- Yin, Robert K. (1984). *Case Study Research : Design and Design and Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.